

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penciptaan *good governance* dilakukan dalam rangka mewujudkan dan menciptakan suatu tatanan masyarakat pada umumnya dan sistem pengelolaan negara pada khususnya yang lebih baik serta tidak menerapkan kembali sistem yang cenderung bersifat korupsi, kolusi dan nepotisme (Wijaya, dkk, 2014). Sedangkan fakta yang terlihat sebagai bukti lemahnya penerapan *good governance* adalah terjadinya kasus korupsi yang terbilang tinggi. Masalah-masalah inilah yang menyebabkan terhambatnya proses perekonomian yang baik di Indonesia, sehingga semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia dan juga semakin banyaknya jumlah penduduk miskin sehingga bisa dikatakan bahwa implementasi *good governance* masih jauh dari harapan (Ristanti, dkk, 2014). Dan lemahnya penerapan *good corporate governance* dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 (Purba, 2011).

Secara teori *good governance* dikatakan menekankan pada proses pengelolaan pemerintahan dengan adanya *stakeholders* yang terlibat dalam bidang sosial, ekonomi dan juga politik serta ikut juga terlibat dalam pendayaan sumber daya yang ada, manusia atau pun keuangan yang dilaksanakan menurut keperluan masing-masing (Ristanti, dkk, 2014).

Praktik pemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan iklim keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance* pada sektor *public* (Wijaya, dkk, 2014).

1. Pertama, keterbukaan memang sangat diperlukan untuk meyakinkan bahwa *stakeholders* memiliki keyakinan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan terhadap institusi pemerintah dan terhadap pengelolaan kegiatan oleh instansi pemerintah tersebut. Iklim keterbukaan yang diciptakan melalui proses komunikasi yang jelas, akurat, dan efektif dengan pihak *stakeholders* dapat membantu proses pelaksanaan suatu kegiatan secara tepat waktu dan efektif.
2. Kedua, integritas mencakup dua hal pokok yaitu kejujuran dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya, dana, dan urusan publik. Dalam organisasi, integritas ini tercermin pada prosedur pengambilan keputusan dan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu.
3. Ketiga, akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap individu maupun secara organisatoris pada institusi publik kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan atas pengelolaan sumber daya, dana, dan seluruh unsur kinerja yang diamanatkan kepada mereka.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan

cita-cita bangsa dan negara karena hal inilah pemerintah sangat memerlukan adanya pengendalian intern. Al-Zwyalif (2015) mengatakan bahwa:

“Good corporate governance cannot exist without internal control. This leads to considering the role of internal control in corporate governance. Internal control is the process implemented by the board of directors and management to provide reasonable assurance that the following objectives are achieved: safeguarding assets, compliance with applicable laws and regulations, reliability and transparency of financial reporting, and efficiency and effectiveness of operations. (Tata kelola perusahaan yang baik tidak bisa ada tanpa pengendalian internal. Hal ini menyebabkan mempertimbangkan peran pengendalian internal dalam tata kelola perusahaan. Pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi dan manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan berikut tercapai: asset menjaga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, keandalan dan transparansi pelaporan keuangan, dan efisiensi dan efektivitas operasi).”

Internal control consists of the organization planning that includes all methods used to safeguard the company assets, to insure the reliability of information, to support the efficiency and effectiveness of operations, and to insure the compliance with rules and regulations. (Pengendalian internal terdiri dari perencanaan organisasi yang mencakup semua penggunaan metode untuk menjaga aset perusahaan, untuk memastikan keandalan informasi, untuk mendukung efisiensi dan efektivitas operasi, dan untuk memastikan kepatuhan dengan aturan dan peraturan) (Suyono, dkk, 2012).

Pengendalian intern dalam pelaksanaannya juga harus diuji keefektifitasannya. Penentuan apakah pengendalian telah diimplementasikan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat serta apakah pelaksana sudah memiliki kewenangan dan kualifikasi yang

dibutuhkan untuk mengimplementasikan pengendalian tersebut secara efektif merupakan tujuan dari dilaksanakannya pengujian pengendalian intern (Ristanti, dkk, 2014).

Dengan diterapkannya pengendalian intern secara efektif yang bertujuan (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi dari operasional dan (3) pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa diterapkan, maka organisasi telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* akan berhasil jika didukung oleh pengendalian intern yang efektif dari organisasi tersebut (Wijaya, dkk, 2014).

Tidak hanya pengendalian intern yang harus ditingkatkan dalam pemerintahan, namun juga komitmen organisasi dalam konteks anggota organisasi. Menurut Suyono, dkk (2012), *Organization Commitment is defined as the individual relative power to identify his/her into the organization* (Komitmen organisasi didefinisikan sebagai kekuatan relatif individu untuk identitasnya ke dalam organisasi). Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi, menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif. Dimana komitmen organisasi yang kuat dalam individu akan menyebabkan individu berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan dalam organisasi (Wiratno, dkk, 2013).

Komitmen organisasi mencakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Seperti halnya pemerintah harus memiliki keyakinan akan etik dan komitmen untuk loyal, memiliki keinginan untuk mencapai prestasi dalam organisasi dan memiliki ikatan emosi (Ristanti, dkk, 2014). Hal inilah yang akan mewujudkan *good governance*.

Penelitian ini menggunakan obyek pemerintahan daerah di Kabupaten Ponorogo, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal yang mendorong peneliti melakukan penelitian karena peneliti ingin mengetahui pengetahuan dan pemahaman pegawai tentang pentingnya *good governance* yang dipengaruhi oleh pengendalian intern dan komitmen organisasi. Penelitian yang terkait dengan *good governance* memang banyak tetapi penelitian mengenai pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap *good governance* khususnya pada SKPD Kabupaten Ponorogo belum pernah dilakukan karena penelitian yang diangkat lebih banyak mengarah pada pengelolaan keuangan daerah, anggaran daerah, kinerja, budaya organisasi dan *total quality management* serta penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *good governance* belum pernah dilakukan.

Tantangan dalam merealisasikan tujuan implementasi *good governance* sangatlah sulit, mengingat pelayanan publik yang dilakukan pemerintah selama kurun waktu yang panjang telah tercemar berbagai bentuk praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Beberapa

hambatan yang menyebabkan tidak terwujudnya *good governance* di dalam pemerintahan diantaranya adalah kasus korupsi, salah satunya dalam pemerintahan Kabupaten Ponorogo adalah kasus korupsi pengadaan alat peraga Tahun 2012 senilai Rp 6 miliar untuk 121 sekolah dasar negeri (SDN) dan tahun 2013 senilai Rp 2,1 miliar untuk 43 SDN se-Kabupaten Ponorogo. Akibat praktik suap itu, negara dirugikan Rp 5,5 miliar yang diduga menjadi bahan bancakan (<http://regional.kompas.com>).

Selain itu, sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Ponorogo adalah modus penyelewengan dana dimana kegiatan ini menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2013 senilai Rp 1,4 miliar dan 2014 sebanyak Rp 1,5 miliar (<https://m.tempo.co>). Selanjutnya kasus korupsi dana proyek pengadaan sapi senilai Rp 2 miliar (www.antikorupsi.org). Dan kasus dugaan korupsi pengadaan Bibit Tanaman Hutan senilai Rp 1,8 miliar Tahun 2013 (www.tribunnews.com). Tingkat korupsi yang tinggi mencerminkan bahwa implementasi *good governance* masih jauh dari harapan.

Kesiapan Kabupaten Ponorogo dalam menerapkan *good governance* jika dilihat dari data kelengkapan dokumen, yaitu adanya visi dan misi tampak seolah-olah ada kesiapan dari Kabupaten Ponorogo untuk penerapan *good governance*. Namun demikian jika dilihat dan dicermati dari isi visi dan misinya ternyata tidak ada yang mengarah pada suatu visi yang strategis yang *matching* dengan kondisi potensi Ponorogo. Visi dan misi yang ditampilkan hanyalah sekedar untuk memenuhi ritualis tata

aturan sekarang dimana seorang Kepala Daerah dalam menjabat sekarang harus menyampaikan visi dan misi, sebagaimana mengikuti alur Pemerintah Pusat. Sehingga dari sini terlihat bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil hanyalah sekedar rutinitas belaka, sehingga sulit untuk diharapkan adanya prestasi yang bisa diraih dengan otonomi daerah. Padahal di era otonomi luas seperti ini merupakan suatu kesempatan emas bagi daerah untuk mengejar kerteringgalan dalam segala hal dengan daerah lain baik dalam level lokal, nasional maupun internasional. Namun itu hanya bisa diraih dengan kerja keras dari semua pihak yang dimotori oleh pemerintah, yang tentunya diawali dengan visi dan misi yang strategis dalam penentuan dan pengambilan kebijakan. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya tampaknya memiliki kesiapan, namun belum ada suatu penelitian yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan yang tinggi akan memiliki komitmen untuk menjalankan *good governance*. Dan jika dilihat dari faktor kendala dan pendukung, yaitu yang menyangkut kepemimpinan maupun kultur birokrasi, tampaknya keduanya lebih banyak menjadi kendala daripada menjadi pendukung dalam penerapan *good governance* (Said dan Widiyahseno, 2005). Inilah alasan peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance* Pada Kabupaten Ponorogo.”**

1.2 Perumusan Masalah

Good governance adalah bukan tujuan akan tetapi merupakan metode atau cara untuk menjalankan suatu tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu indikatornya sangat variatif dan tidak mutlak, sangat tergantung pada kondisi sosial ekonomi dan budaya daerahnya masing-masing. Sehingga penerapan *governance* antara daerah satu dengan yang lain *sressing*-nya bisa berbeda-beda. Sebenarnya penerapan *good governance* dalam Pemerintahan Daerah adalah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditunda lagi jika ingin daerah tersebut maju dan masyarakatnya sejahtera. Namun demikian sampai sekarang tampaknya masih akan menemui berbagai kendala baik yang bersifat struktural maupun kultural (Said dan Widiyahseno, 2005).

Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalah yang perlu mendapat tanggapan adalah

1. Apakah Implementasi Pengendalian Intern berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance* pada Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance* pada Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah Implementasi Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance* pada Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris:

1. Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern terhadap penerapan *Good Governance*;
2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap penerapan *Good Governance*; dan
3. Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap penerapan *Good Governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Bagi instansi pemerintah

Sebagai masukan bagi instansi pemerintah dalam penerapan *good governance* khususnya bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo.

2. Bagi akademisi

Sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu dan dapat memberikan inspirasi serta kontribusi bagi penelitian-penelitian lainnya terkait penerapan *good governance*.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai referensi penelitian selanjutnya yang tertarik dengan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *good governance*.

